

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kerawanan pangan dan kemiskinan merupakan sesuatu yang saling berkaitan (Booth dan Smith, 2001). Masalah kemiskinan berhubungan erat dengan kerawanan pangan walaupun tidak identik (Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, 2018). Kerawanan pangan dapat semakin memperdalam kemiskinan, tidak hanya menimbulkan efek negatif pada berkurangnya asupan nutrisi, kesehatan dan mata pencaharian tetapi rumah tangga bahkan dapat melakukan penjualan aset yang membuat rumah tangga tersebut lebih sulit untuk keluar dari kemiskinan (Harrigan, 2008). Studi (Mokonnen dan Gerber, 2017) menyebutkan bahwa walaupun beberapa tahun mengalami perbaikan tetapi masalah kemiskinan dan kerawanan pangan tetap menjadi tantangan. Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia tetapi masalah krisis dan kerawanan pangan masih menjadi masalah di banyak negara (Stezhko, 2016); (Hasibuan, Waromi dan Utomo, 2018) terutama di negara berkembang, termasuk Indonesia (Riptanti dkk. 2018).

Subsidi dan bantuan pangan adalah salah satu kebijakan yang sering digunakan oleh pemerintah untuk mengontrol harga makanan. Di Maluku Utara, pemerintah daerah memberikan subsidi pada beras, minyak goreng, dan gula. Subsidi ini membantu menstabilkan harga makanan, membuatnya lebih murah bagi orang-orang, terutama mereka yang berpenghasilan rendah. Selain itu, program bantuan pangan seperti Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) mengurangi

beban ekonomi masyarakat dengan memberikan makanan secara langsung kepada masyarakat.

Pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk beberapa komoditas pangan untuk mencegah kenaikan harga yang tidak terkendali. HET ini berlaku di Maluku Utara untuk komoditas seperti beras, minyak goreng, dan gula pasir. HET dibuat untuk melindungi konsumen dari harga yang terlalu tinggi yang disebabkan oleh praktik pasar yang tidak sehat atau spekulasi.

Untuk menjamin ketersediaan makanan di seluruh wilayah, termasuk wilayah terpencil Maluku Utara, efisiensi logistik dan distribusi sangat penting. Kebijakan pemerintah daerah yang meningkatkan infrastruktur jalan, pelabuhan, dan fasilitas penyimpanan dapat membantu mengurangi biaya distribusi. Karena biaya logistik yang lebih rendah dapat menurunkan harga jual makanan di pasar, ini berdampak langsung pada harga makanan.

Selain itu, pemerintah daerah menerapkan kebijakan yang membantu meningkatkan hasil pertanian lokal. Tujuan program pertanian di Maluku Utara adalah untuk meningkatkan produktivitas pertanian melalui penyediaan bibit unggul, pupuk subsidi, dan pelatihan petani. Harga makanan dapat lebih stabil dengan produksi yang cukup dan tidak terlalu terpengaruh oleh fluktuasi pasokan luar.

Selain itu, karena Maluku Utara sangat bergantung pada impor makanan dari wilayah produsen seperti Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara, kebijakan impor pangan juga memiliki dampak yang signifikan terhadap biaya makanan di Maluku Utara. Pemerintah daerah dapat membuka keran impor untuk

komoditas tertentu jika produksi lokal tidak mencukupi. Ini dilakukan untuk menjaga pasokan dan mencegah harga melonjak. Namun, agar petani lokal tidak dirugikan, kebijakan impor harus diatur dengan hati-hati.

Kebijakan moneter dan fiskal, seperti penetapan suku bunga dan kebijakan pajak, juga dapat mempengaruhi harga pangan. Inflasi yang tinggi, misalnya, dapat menyebabkan harga pangan naik. Oleh karena itu, kebijakan yang menjaga stabilitas ekonomi makro juga berperan dalam menjaga kestabilan harga pangan di Maluku Utara.

Maluku Utara adalah salah satu provinsi Indonesia dengan sumber daya alam yang paling kaya. Provinsi ini memproduksi berbagai komoditi penting, seperti rempah-rempah, kelapa, kopra, ikan, dan hasil laut lainnya. Meskipun demikian, komoditas pangan yang sering mengalami inflasi di Maluku Utara termasuk beras, bawang merah, bawang putih, ikan segar, cabe, telur ayam, gula pasir, dan minyak goreng.

Selain itu, inflasi di Provinsi Maluku Utara cenderung berfluktuasi, bahkan beberapa bulan lebih tinggi dari rata-rata nasional. Sebagian besar pasokan makanan untuk Maluku Utara berasal dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Surabaya. Ini membuat harga makanan cenderung lebih mahal karena ketergantungan pada pasokan dari luar wilayah.

Selain Kota Weda di Kabupaten Halmahera Tengah, Kota Ternate menjadi indikator inflasi di Maluku Utara hingga tahun 2023. Pada tahun 2021, Kota Ternate mengalami inflasi 2,38%, naik menjadi 3,37% pada tahun 2022, dan naik lagi menjadi 4,41% pada tahun 2023. Kenaikan laju inflasi bahan pangan adalah

faktor lain yang menyebabkan kenaikan inflasi setiap tahun. Maluku Utara mengalami inflasi sebanyak delapan kali setiap bulan sepanjang tahun 2022. Inflasi tertinggi tercatat pada bulan Juli 2022 sebesar 1,82 persen, sementara deflasi tertinggi tercatat pada bulan Februari 2022 sebesar 1,11 persen. Peningkatan tarif angkutan udara, bensin, bawang merah, beras, dan rokok kretek filter menyebabkan inflasi tertinggi pada Juli 2022. Inflasi tertinggi kedua terjadi pada Desember, yang disebabkan oleh kenaikan tarif angkutan udara, bawang merah, cabai rawit, dan cabai merah.

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), Untuk Tahun 2024 periode Januari inflasi Maluku Utara tergolong tinggi secara nasional, yaitu pada Januari 2024 (y-on-y) tercatat sebesar 5,33 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,69. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Halmahera Tengah sebesar 5,00 persen dengan IHK 107,68 dan terendah di Kota Ternate sebesar 4,19 persen dengan IHK 106,48. Pada bulan Maret 2024 inflasi (y-on-y) Provinsi Maluku Utara sebesar 3,57 persen dengan Indeks Harga Konsumsi (IHK) sebesar 106,75, Inflasi tertinggi terjadi di Kota Ternate sebesar 3,70 persen dengan IHK sebesar 106,81, dan terendah terjadi di Kabupaten Halmahera Tengah sebesar 2,97 persen dengan IHK sebesar 106,46.

Perkembangan harga berbagai komoditas secara umum di Provinsi Maluku Utara menunjukkan adanya kenaikan harga pada Maret 2024. Berdasarkan laporan BPS Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Tengah dan Kota Ternate, pada Maret 2024, komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y , antara lain: beras, bahan bakar rumah tangga, kue kering berminyak,

angkutan udara, sigaret Kretek Mesin (SKM), gula pasir bawang putih, ketimun ikan malalugis/sorihi, angkutan laut emas perhiasan, buah naga, sabun mandi, ikan cakalang/sisik, kue, basah, bawang merah, air kemasan, dan nasi dengan lauk.

Perkembangan harga pangan tersebut juga dipengaruhi kondisi iklim dan cuaca di Maluku Utara. Data proyeksi iklim menunjukkan jumlah hari kering di wilayah Maluku Utara diproyeksikan semakin meningkat khususnya di wilayah Sanana dan Taliabu sedangkan jumlah hujan ekstrem diproyeksikan meningkat di wilayah Halmahera Tengah, Timur dan Selatan. Kondisi iklim ini dapat mempengaruhi proses distribusi barang baik antar wilayah dalam provinsi maupun pasokan distribusi dari luar provinsi. Tinggi gelombang diprediksi akan mengalami peningkatan seiring puncak musim hujan di awal tahun 2024. Tinggi gelombang > 2 meter diprediksi akan sering muncul di bulan Januari – Februari 2024. Wilayah yang memiliki potensi peningkatan tinggi gelombang > 2 meter adalah wilayah perairan Utara Morotai, Ternate-Bitung, dan Laut Halmahera.

Jenis pangan pokok tertentu yang menjadi fokus perhatian dalam upaya penanganan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan adalah Jenis Pangan pokok yang sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2021, tentang Badan Pangan Nasional, serta yang disebutkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2022, tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, yaitu beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging unggas, telur unggas, daging ruminansia, gula konsumsi, minyak goreng dan ikan.

Sejauh ini, provinsi, kabupaten, dan kota di Maluku Utara telah melakukan upaya untuk stabilisasi pasokan pangan, harga, dan pengendalian inflasi. Namun,

upaya-upaya ini belum optimal secara keseluruhan, dan memerlukan inovasi baru dan terobosan.

Dari permasalahan tersebut diatas bahwa faktor pemicu terjadinya kenaikan harga pangan adalah kurangnya pasokan dan ketersediaan bahan pangan, hal ini disebabkan oleh iklim dan cuaca, infrastruktur, tingginya biaya produksi, tingginya biaya transportasi dan perdagangan, Permittaan Pasar, Kebijakan Pemerintah dan spekulasi penimbunan. Sehingga berdampak pada daya beli masyarakat rendah. Berdasarkan masalah tersebut maka penelitian ini difokuskan pada kebijakan pemerintah dalam mengatasi kenaikan harga pangan. Dan apakah kebijakan pangan dapat menyebabkan kestabilan ekonomi dan mendorong daya beli masyarakat.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang menjadi dasar penelitian ini, adalah :

1. Apakah Kebijakan Pemerintah Berpengaruh Terhadap Harga Pangan di Maluku Utara (Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate, dan Kabupaten Halmahera Tengah).
2. Apakah Kebijakan Pemerintah Berpengaruh Terhadap Pasokan Pangan di Maluku Utara.
3. Apakah Kebijakan Pemerintah Mempengaruhi Daya Beli Masyarakat di Maluku Utara.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah:

1. Menganalisa Pengaruh Kebijakan Pemerintah Terhadap Harga Pangan di Maluku Utara (Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate, dan Kabupaten Halmahera Tengah).
2. Menganalisa Pengaruh Kebijakan Pemerintah Terhadap Pasokan Pangan di Maluku Utara (Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Tengah).
3. Menganalisa Pengaruh Kebijakan Pemerintah Terhadap Daya Beli Masyarakat di Maluku Utara.

1.4. Manfaat Penelitian

Pelaksanaan Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dijadikan rujukan referensi penelitian selanjutnya, adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan menjadi rekomendasi kepada pemegan otoritas dalam hal ini adalah Dinas Pangan baik di level provinsi maupun di Kabupaten/Kota. Memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi pemerintah daerah terkait efektifitas pelaksanaan kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan serta penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah.
2. Penelitian ini juga diharapkan menjadi rujukan informasi dalam penyusunan urgensi kebijakan dalam upaya peningkatan ketahanan pangan dan mejaga ketahanan pangan melalui peningkatan produksi pangan, penyediaan pasokan

pangan dan mengatur kelancaran distribusi pangan dari ke wilayah Maluku Utara.

1.5. Hipotesis Penelitian

1. Terdapat Pengaruh Kebijakan Pemerintah Terhadap Harga Pangan di Maluku Utara (Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate, dan Kabupaten Halmahera Tengah).
2. Terdapat Pengaruh Kebijakan Pemerintah Terhadap Pasokan Pangan di Maluku Utara.
3. Terdapat Pengaruh Kebijakan Pemerintah Terhadap Daya Beli Masyarakat di Maluku Utara.